

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 28 Juli 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Antaranews.com	Senin, 27 Juli 2020	Dengan SiKasep, Kementerian PUPR dorong milenial miliki rumah sendiri	<p>Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong generasi milenial memiliki rumah atau hunian sendiri. Direktur PPDPP Arief Sabaruddin mengingatkan bahwa selagi ada waktu, generasi muda harus segera memanfaatkan waktu yang ada. PPDPP hadir dengan aplikasi yang sangat cocok dengan kaum milenial.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1634966/dengan-sikasep-kementerian-pupr-dorong-milenial-miliki-rumah-sendiri</p>
2	Antaranews.com	Senin, 27 Juli 2020	Kementerian PUPR alokasikan Rp22,4 miliar bedah rumah di Bireuen	<p>Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran anggaran hingga total Rp 22,4 miliar guna melakukan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah 1.280 unit di Kabupaten Bireun, Aceh.</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/1634902/kementerian-pupr-alokasikan-rp224-miliar-bedah-rumah-di-bireuen</p>
3	Okezone.com	Senin, 27 Juli 2020	Pasok Air Bersih Jakarta, Proyek Ini Dilelang	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersiapkan proses lelang proyek Sistem Penyediaan Air Minum Regional Ir H Djuanda (SPAM). Infrastruktur ini akan digunakan untuk pemenuhan air baku wilayah Jakarta.</p> <p>https://economy.okezone.com/read/2020/07/27/320/2252751/pasok-air-bersih-jakarta-proyek-ini-dilelang</p>
4	Beritasatu.com	Senin, 27 Juli 2020	Kempupera Perbaiki Sarana Pendidikan Provinsi Riau Senilai Rp 32 Miliar	<p>Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) merehabilitasi fasilitas pendidikan sekolah di Provinsi Riau di tengah Pandemi Covid-19, dengan anggaran Rp 32 miliar.</p> <p>https://www.beritasatu.com/nasional/659647/kempupera-perbaiki-sarana-pendidikan-provinsi-riau-senilai-rp-32-miliar</p>
5	Timesindonesia.com	Senin, 27 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Segera Tuntaskan Renovasi Pasar dan RSUD Tulehu di Maluku Tengah	<p>Sebagai upaya meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR RI telah menyelesaikan renovasi RSUD Tulehu (Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu), Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. RS ini rusak akibat bencana gempa bumi bermagnitudo 6,5 SR yang terjadi pada 26 September 2019 lalu di Kota Ambon dan sekitarnya.</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/287086/kementerian-pupr-ri-segera-tuntaskan-renovasi-pasar-dan-rsud-tulehu-di-maluku-tengah</p>
6	Timesindonesia.com	Senin, 27 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Lanjutkan Pembangunan Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR RI secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 966,59 Km.</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/287083/kementerian-pupr-ri-lanjutkan-pembangunan-jalan-perbatasan-indonesiamalaysia-di-kaltara</p>
7	Kompas.tv	Senin, 27 Juli 2020	Wamen PUPR Cek Progres Pembangunan Pasca Gempa	<p>Komitmen Kementrian PUPR untuk menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Maluku pada 26 September 2019 lalu kini mulai menunjukkan progress. Salah satunya pekerjaan renovasi Rumah Sakit Umum Dokter Ishak Umarela Tulehu</p>

				<p>Maluku Tengah yang telah rampung dikerjakan 100% dan mulai digunakan untuk melayani pasien.</p> <p>https://www.kompas.tv/article/97151/wamen-pupr-cek-progres-pembangunan-pasca-gempa</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20200727/45/1271883/pascagempa-maluku-pupr-tuntaskan-renovasi-rsud-tulehu</p>
8	Jurnalpresisi.com	Senin, 27 Juli 2020	Kementerian PUPR Dorong Kaum Milenial Untuk Beli Rumah Hanya Melalui Genggaman	<p>Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong (Kementerian PUPR) generasi milenial memiliki rumah atau hunian sendiri.</p> <p>https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-15637506/kementerian-pupr-dorong-kaum-milenial-untuk-beli-rumah-hanya-melalui-genggaman</p>
9	Kompas, halaman 16	Selasa, 28 Juli 2020	KLHK Dorong Pemanfaatan Teknologi RDF dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia	<p>Sampah menjadi masalah besar di negara ini. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, pada 2020 jumlah timbunan sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Pemerintah berupaya mengatasinya dengan penggunaan teknologi pengelolaan sampah, salah satunya refused devided fuel (RDF). Pembangunan fasilitas RDF di Cilacap ini merupakan kerja sama beberapa pihak, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berperan dalam penyediaan bangunan utama.</p>
10	Koran Tempo, halaman ekonomi & bisnis 1	Selasa, 28 Juli 2020	Pemerintah Percepat Lelang Pembayaran Tol Tanpa Sentuh	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat proses lelang sistem pembayaran tol tanpa henti alias multi lane free flow (MLFF) yang penerapannya sudah direncanakan sejak tiga tahun lalu.</p>

Judul	KLHK Dorong Pemanfaatan Teknologi RDF dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia	Tanggal	Selasa, 28 Juli 2020
Media	Kompas, halaman 16		
Resume	Sampah menjadi masalah besar di negara ini. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, pada 2020 jumlah timbunan sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Pemerintah berupaya mengatasinya dengan penggunaan teknologi pengelolaan sampah, salah satunya <i>refused derived fuel</i> (RDF). Pembangunan fasilitas RDF di Cilacap ini merupakan kerja sama beberapa pihak, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berperan dalam penyediaan bangunan utama.		

KLHK Dorong Pemanfaatan Teknologi RDF dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia

Fasilitas *refused-derived fuel* atau RDF kini telah beroperasi di Cilacap. Teknologi yang dapat mengolah sampah menjadi sumber energi terbarukan pengganti batu bara ini dinilai potensial untuk membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di Indonesia.

Sampah menjadi masalah besar di negara ini. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, pada 2020 jumlah timbunan sampah nasional mencapai 67,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 49 persen sampah yang dikelola dengan baik yang benar. Sisanya yang belum dikelola dengan baik dan benar 50,8 persen, yaitu langsung di buang ke lingkungan dan *open dumping*, termasuk operasional TPA-nya. Pemerintah berupaya mengatasinya dengan penggunaan teknologi pengelolaan sampah, salah satunya *refused-derived fuel* (RDF).

RDF adalah energi terbarukan yang dihasilkan dari material sampah domestik melalui proses pengolahan dan pengeringan secara biologis terlebih dahulu. Selain dapat mengurangi kebutuhan lahan TPA, teknologi ini terutama dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Baru-baru ini, fasilitas RDF yang pertama di Indonesia, yaitu di TPA Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, diresmikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa dan

TPA eksisting yang hampir penuh, ditambah dengan adanya pabrik semen yang dapat memanfaatkan bahan bakar olahan RDF, Kabupaten Cilacap dinilai menjadi lokasi yang tepat untuk proyek perdana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dengan metode RDF. Pembangunan fasilitas RDF di Cilacap ini merupakan kerja sama beberapa pihak, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berperan dalam penyediaan bangunan utama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyediakan mesin yang berasal dari hibah Kedutaan Besar



Denmark-Danida, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan sarana pendukung, Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menyediakan tanah dan akses jalan, dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).

Potensi menjanjikan

Fasilitas pengolahan sampah RDF tersebut dioperasikan Pemkab Cilacap bekerja sama dengan PT SBI. Per harinya, fasilitas ini dapat mengolah 120 ton sampah menjadi sekitar 60 ton RDF. Prosesnya, sampah organik dipilah, diberi bioaktivator, kemudian dicacah. Setelah dicacah, sampah dibentuk menjadi *pellet* dan dikering-

kan sampai kadar airnya mencapai 22 persen.

RDF dapat digunakan dalam penunjang bahan bakar (*co-firing*) dalam kiln semen atau pembakaran di *boiler* berbahan bakar batu bara. Oleh karena itu, ini sangat potensial dimanfaatkan untuk substitusi kebutuhan batu bara pada industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Apalagi, harganya jauh lebih rendah ketimbang batu bara. Harga RDF sekitar Rp 300 ribu per ton atau sekitar 20 dollar AS, sementara harga batu bara 40-50 dollar AS per ton.

"Peresmian *plant* RDF pengolahan sampah di Kabupaten Cilacap dengan kapasitas sampah 120 ton per hari adalah tonggak sejarah penting dalam upaya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah berskala kota di Indonesia. Saat ini, kita memiliki lompatan baru dengan teknologi RDF, dengan mengolah sampah menjadi *biomassa*, selanjutnya sebagai *co-firing* batu bara di *plant* industri semen dan *plant* PLTU," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien.

Penerapan teknologi bernilai Rp 70-80 miliar per unit ini diperkirakan akan dapat mengolah sampah di Indonesia hingga lebih dari 20 ribu

ton per harinya kelak. Saat ini, inovasi serupa juga sedang dikembangkan di Kabupaten Tuban dan Banyumas serta daerah-daerah lainnya yang terdapat *Plant* Industri Semen dan PLTU. Rosa menambahkan, teknologi RDF ini juga telah melengkapi kemajuan teknologi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebelumnya pada 12 kota yang telah ditetapkan presiden, serta teknologi TPA pada kabupaten dan kota lainnya.

"Potensi teknologi RDF ini, dengan *offtake*-nya *plant* industri semen dan PLTU, relatif sangat besar. Paling tidak ini berpotensi mengolah sampah 8.000 ton per hari pada industri semen serta 16.000 ton per hari pada PLTU di seluruh Indonesia," imbuh Rosa.

Dioperasikannya teknologi RDF menjadi langkah maju yang signifikan bagi Indonesia, terlebih mengingat target tercapainya kapasitas pengelolaan sampah sebesar 100 persen pada 2025. Ini dibagi menjadi pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sebesar 70 persen.

"Kami sangat meyakini, dengan apa yang telah kita tunjukkan pada hari ini, bahwa pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilakukan 100 persen, sebagaimana Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas dapat kita wujudkan menjadi sebuah realita, bukan utopia," tandas Rosa. [NOV]



Judul	Pemerintah Percepat Lelang Pembayaran Tol Tanpa Sentuh	Tanggal	Selasa, 28 Juli 2020
Media	Koran Tempo, halaman ekonomi & bisnis 1		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat proses lelang sistem pembayaran tol tanpa henti alias multi lane free flow (MLFF) yang penerapannya sudah direncanakan sejak tiga tahun lalu.		

EKONOMI DAN BISNIS

Pemerintah Percepat Lelang Pembayaran Tol tanpa Sentuh

Sistem ini akan dipakai lebih dulu di Jakarta dan sekitarnya, sebelum diperluas ke ruas Trans Jawa.

EDISI, 28 JULI 2020



JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat proses lelang sistem pembayaran tol tanpa henti alias *multi lane free flow* (MLFF) yang penerapannya sudah direncanakan sejak tiga tahun lalu. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit, mengatakan tender proyek yang nilai investasinya menembus Rp 2,9 triliun itu sudah masuk tahap prakualifikasi (PQ).

"Pekan pertama Agustus nanti adalah batas pemasukan dokumen perusahaan. Kami baru umumkan perusahaan yang lolos PQ," ucapnya kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Danang, MLFF akan diterapkan bertahap di berbagai ruas sepanjang 1.713 kilometer. Sebelum pengoperasian penuh pada 2022, pemerintah akan memetakan lokasi penerapan awal. "Nanti tergantung kesiapan regional," ujarnya.

Sistem transaksi nir-sentuh itu menjadi salah satu proyek yang selangnya diupayakan rampung oleh Kementerian PUPR sebelum akhir tahun ini. Selain mempercepat lelang MLFF yang tendernya diawali pada April lalu, pemerintah mengejar pemodal untuk lima proyek jalan tol, dari ruas Solo-Yogyakarta, Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), jalan tol akses Pelabuhan Patimban, Bogor-Serpong via Parung, serta dua ruas layang di Cikunir.

Digaungkan lagi pada pertengahan 2019, MLFF menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggenjot elektronifikasi di tiga aspek, yakni bantuan sosial, transaksi pemerintah daerah, serta transportasi. MLFF dianggap bisa memudahkan transaksi non-sentuh dan antrean di gerbang tol dengan penggunaan Global Navigation Satellite System (GNSS) yang mendeteksi setiap kendaraan pelintas. Adapun proyek yang dilelang kementerian merupakan rancangan perusahaan asal Hongaria, Roatex Ltd Zrt. Pada April lalu, tender ini sudah menjaring lebih dari 30 entitas pendaftar, termasuk pemodal asing yang sudah menjadi perusahaan Indonesia.

Meski belum merinci, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja memproyeksikan MLFF akan dipakai lebih dulu di lingkaran perkotaan, seperti Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), sebelum diperluas ke ruas Trans Jawa.

Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Agus Setiawan mengatakan manajemennya sudah sempat menguji sistem nir-sentuh *single lane free flow* (SLFF), skema serupa MLFF yang hanya diperuntukkan bagi sebagian gardu. Meski belum bisa memperkirakan dampak operasi ataupun kelancaran lalu lintas ruas jika berhasil memakai MLFF, Agus memastikan perusahaannya turut serta dalam tender melalui entitas anak usaha PT Jasamarga Tollroad. "Yang pasti, layanan semakin cepat karena pengguna tak perlu berhenti," katanya.

Dengan jenis teknologi yang sedikit berbeda, Jasa Marga sempat menguji sistem di beberapa ruas yang baru dibuka pada awal tahun ini. Lokasi uji coba itu menyebar di kawasan Bali, Jakarta, serta di Cipularang.

Grup Astra, melalui Astra Intra Toll, juga sempat mencoba sistem ini pada awal tahun lalu di empat gerbang tol Tangerang-Merak, yaitu Cikupa, Cikande, Serang Barat, dan Serang Timur. Bedanya, Astra memakai teknologi *dedicated short range communication* (DSRC), yang memungkinkan penyimpanan data atau identitas kendaraan melalui alat yang terpasang di kendaraan alias *on board unit* (OBU).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia Krist Ade Sudyono menolak berkomentar ihwal prospek penggunaan MLFF di Indonesia. Asosiasi belum memperkirakan keuntungan apa yang didapat dari pengoperasian produk anyar itu. "Kami masih harus menganalisis keandalan sistem, bisnis model, dan bagaimana operasinya," kata dia, kemarin.

Jalan Panjang Memakai Pintu Otomatis

Konsep transaksi tol non-sentuh atau *multi-lane free flow* (MLFF) sudah menjadi mimpi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Meski pemanfaatan uang elektronik sudah cukup memangkas waktu transaksi di pintu tol, dari 10 detik (bila transaksi secara manual) menjadi 4 detik, pemerintah masih mengincar MLFF untuk menihilkan antrean di jalur bebas hambatan. Berikut ini sejumlah tahapan yang disiapkan pemerintah menuju MLFF.

Peniadaan transaksi manual

Pada pertengahan tahun lalu, regulator sudah menerapkan 100 persen elektronifikasi jalan tol di 50 ruas milik 33 badan usaha dengan total panjang 1.780 kilometer. Transaksi manual digantikan pembayaran berbasis kartu cip yang dikeluarkan sejumlah bank penerbit.

Integrasi ruas tol

Pemerintah memastikan integrasi pengelolaan sejumlah ruas strategis sejak 2017, contohnya ruas tol Tangerang-Merak dan Jakarta-Tangerang. Sistem transaksi di ruas Jagorawi diubah dari awalnya tertutup menjadi sistem transaksi terbuka. Pada 2018, integrasi menyasar sebagian jalan tol lingkas luar Jakarta dan Prof. Sedyatmo, jalan tol Semarang ABC dan Semarang-Solo, jalan tol akses Tanjung Priok dan Pondok Aren-Ulujami, serta sejumlah perubahan di ruas lain.

Uji kelayakan

Studi kelayakan MLFF mulai diteger pada 2019. Pemerintah sempat menyeleksi opsi teknologi yang akan digunakan, baik Global Navigation Satellite System (GNSS), Dedicated Short Range Communication (DSRC), maupun jenis lainnya.

Lelang MLFF

Kementerian PUPR memulai lelang MLFF bersama sejumlah proyek jalan tol prioritas pada April 2020. Pengenalan proyek tersebut berjalan pada masa pandemi agar bisa segera mendapatkan pemodal. Tender diminati 31 pendaftar dan sudah masuk tahap prakualifikasi.

YOHANES PASKALIS

SUMBER: RISET, WAWANCARA

Pemerintah Percepat Lelang Pembayaran Tol tanpa Sentuh